

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi dapat dinilai melalui jumlah penduduk yang masuk dalam angkatan kerja, yaitu penduduk yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun). Dalam hal ini, perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk berkontribusi dalam angkatan kerja. Persamaan hak pekerja laki-laki dan pekerja perempuan tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 yaitu "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Akses perempuan terhadap pasar tenaga kerja adalah aspek penting yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam pembangunan. Sehingga baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk berada dan bersaing di pasar tenaga kerja.

Dengan melibatkan perempuan dalam dunia kerja, mereka dapat menjadi penggerak dan pendorong pembangunan suatu negara. Inilah kunci tercapainya *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak. Peran perempuan dalam partisipasi angkatan kerja akan memberikan dampak yang nyata pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi (Psacharopoulos dan Tzannatos, 1989). Perempuan yang masuk ke dalam pasar kerja memiliki potensi untuk

meningkatkan pendapatan rumah tangga dari upah yang diperoleh sehingga akan membantu rumah tangga untuk lepas dari kemiskinan (Septiawan dan Wijaya,



2020).

Namun, banyak orang sekarang beranggapan bahwa tanggung jawab perempuan hanya sekedar mengurus keluarga. Namun seiring perkembangan zaman, kaum perempuan mulai berani mengambil peran mereka dengan memasuki pasar tenaga kerja dengan pendidikan dan keterampilan yang mereka miliki. Akan tetapi perempuan cenderung menghadapi hambatan besar dalam memperoleh pekerjaan dan kesetaraan perlakuan di dunia kerja (ILO, 2013). Adanya perbedaan perilaku berdasarkan gender, perempuan dipaksa menerima pekerjaan yang kurang produktif. Hal ini memiliki efek menghalangi peluang perempuan memasuki pasar tenaga kerja sehingga tenaga kerjanya perempuan lebih fokus pada sektor informal dengan bekerja dari rumah atau bekerja di usaha mikro kecil.

Pada saat ini perempuan telah berani mengambil keputusan untuk berkontribusi sebagai angkatan kerja karena sama halnya dengan laki-laki, perempuan juga memiliki kemampuan untuk bekerja. Untuk mengetahui seberapa jauh sumbangan perempuan dalam pembangunan ekonomi, dapat dilihat dari besarnya peranan perempuan sebagai angkatan kerja. Pada tahun 2024, berdasarkan Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan, perempuan yang berpartisipasi dalam angkatan kerja mencapai 52,64 persen.

Berdasarkan Tabel 1.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan selama lima tahun terakhir mengalami fluktuatif. Dalam hal ini, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja setiap tahunnya tidak mengalami peningkatan atau penurunan yang signifikan. Partisipasi perempuan dalam

kerja tertinggi terjadi pada tahun 2024 yaitu sebesar 52,64 persen. an Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan terendah terjadi



pada tahun 2019 yaitu sebesar 47,01 persen.

Tabel 1. 1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

Tahun	Laki-laki (persen)	Perempuan (persen)
2018	81,33	47,65
2019	81,72	47,01
2020	79,66	48,16
2021	81,03	49,42
2022	82,91	50,46
2023	82,22	49,62
2024	82,52	52,64

Sumber: *Badan Pusat Statistika, 2025*

Berdasarkan data pada tabel, persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Sulawesi Selatan dari tahun 2018 hingga 2021 belum mencapai angka 50 persen, dengan rincian yaitu 47,65 persen pada 2018, 47,01 persen pada 2019, 48,16 persen pada 2020, dan 49,42 persen pada 2021. Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki selama periode 2018 hingga 2023 tercatat konsisten tinggi, selalu berada di atas 79 persen, dengan nilai terendah pada 2020 sebesar 79,66 persen dan tertinggi pada 2022 sebesar 82,91 persen. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan menunjukkan kecenderungan stabil dan cenderung meningkat selama tiga tahun berturut-turut, yaitu tahun 2020, 2021, dan 2022, masing-masing sebesar 48,16 persen, 49,42 persen, dan 50,46 persen.

Namun, pada tahun 2023 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan mengalami sedikit penurunan menjadi 49,62 persen, sebelum kembali meningkat cukup signifikan pada tahun 2024 menjadi 52,64 persen, yang merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Kenaikan ini mencerminkan kemajuan partisipasi perempuan dalam pasar kerja, meskipun masih



terdapat kesenjangan yang cukup besar jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi laki-laki.

Pembangunan manusia merupakan tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan suatu wilayah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang dikembangkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) berdasarkan konsep pembangunan manusia dari Amartya Sen (1999), yang menekankan bahwa pembangunan bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi perluasan kemampuan manusia dalam menjalani kehidupan yang bernilai. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencakup tiga dimensi utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Dalam konteks yang lebih spesifik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dihitung berdasarkan jenis kelamin, salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan, yang menggambarkan sejauh mana perempuan memperoleh akses terhadap layanan dasar dan kualitas hidup yang layak melalui indikator harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, serta pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan berpotensi memberikan dampak positif terhadap keterlibatan perempuan dalam dunia kerja. Hal ini tercermin melalui Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan, yakni persentase perempuan usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik bekerja maupun mencari pekerjaan. Kualitas pendidikan yang lebih baik mendorong peningkatan keterampilan, kesehatan yang optimal memungkinkan produktivitas kerja, dan pendapatan yang layak memberi insentif bagi perempuan untuk lebih

dan terlibat dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan tidak hanya menjadi indikator sosial,



tetapi juga dapat menjadi salah satu determinan penting dalam analisis ketenagakerjaan, khususnya bagi kelompok perempuan usia produktif.

Data dari Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan mengalami peningkatan hingga mencapai angka 72,80 persen pada tahun 2024, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan masih relatif rendah, yaitu sebesar 52,68 persen, jauh di bawah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki yang mencapai 82,52 persen. Fakta ini memperkuat urgensi untuk mengkaji hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan secara lebih mendalam agar dapat menjadi landasan empiris bagi perumusan kebijakan pembangunan yang berfokus pada penguatan peran perempuan dalam pasar tenaga kerja.

Tingkat partisipasi angkatan kerja yang mengalami fluktuasi, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mengakibatkan tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja (Nindya E, 2008). Hal ini dimaksudkan bahwa jumlah mereka yang terlibat dalam pasar tenaga kerja akan bertambah besar pada saat pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan yang signifikan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator pembangunan suatu negara atau daerah. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah harus membandingkan pendapatan riil daerah yang bersangkutan dari tahun ke tahun, indikator yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan perluasan kesempatan kerja karena



produksi tenaga kerja merupakan faktor yang penting bagi pertumbuhan selain dipengaruhi faktor alam dan teknologi.

Dampak dari pertumbuhan ekonomi cukup signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Ketika ekonomi tumbuh, lebih banyak lapangan kerja tercipta, sehingga membuka peluang bagi perempuan untuk memasuki pasar kerja. Selain itu, perubahan sosial yang sering menyertai pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap peran perempuan dalam dunia kerja. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mengakibatkan tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja (Sobita et al, 2014). Hal ini dimaksudkan bahwa jumlah mereka yang terlibat dalam pasar tenaga kerja akan bertambah besar pada saat pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan yang signifikan.

Selain pertumbuhan ekonomi, upah minimum juga dapat mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja. Upah merupakan imbalan atau balas jasa berupa uang yang dibayarkan sebagai balas tenaga atas jasa yang telah diberikan untuk bekerja. Sehingga tingkat upah merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (Dwiyanti, 2022). Tinggi rendahnya upah sangat mempengaruhi kesejahteraan pekerja dan akan berpengaruh terhadap produktivitas pekerja. Adapun tujuan pemberian tingkat upah yang memadai kepada tenaga kerja yaitu untuk meningkatkan produktivitas kerja sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Wintara et al., 2015).

Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Jumlah tenaga kerja keseluruhan yang disediakan bagi suatu perekonomian tergantung pada jumlah penduduk, persentase jumlah penduduk yang masuk angkatan kerja, dan jumlah jam kerja yang ditawarkan oleh angkatan kerja. Masing dari ketiga komponen dari jumlah tenaga kerja tersebut tergantung



pada besar upah pasar (Bellante *et al.*, 1990). Penawaran tenaga kerja sangat ditentukan oleh banyaknya penduduk usia kerja yang memilih menjadi angkatan kerja. Semakin banyak angkatan kerja maka penawaran tenaga kerja juga akan meningkat (Santoso, R. P., 2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja antara lain jumlah penduduk, struktur umur penduduk, produktivitas, tingkat upah, dan kebijaksanaan pemerintah (Pramusinto *et al.*, 2019).

Baik pekerja maupun pengusaha tentunya harus memiliki pemahaman mengenai sistem upah agar produktivitas dapat berjalan dengan maksimal. Di Indonesia, pemerintah mengatur tingkat upah melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum. Dalam Pasal 1 Ayat 1 dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1/1999, upah minimum didefinisikan sebagai upah bulanan terendah yang meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap.

Perkembangan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan setiap tahun mengalami peningkatan, hal tersebut disebabkan karena adanya peningkatan biaya hidup dan inflasi terus meningkat setiap tahunnya. Upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 sebesar Rp2.000.000 kemudian mengalami kenaikan menjadi 250.000 pada tahun 2016 sehingga upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp2.250.000. Kemudian pada tahun 2017 upah minimum sebesar Rp2.435.625, tahun 2018 Rp2.647.767 dan tahun 2019 Rp2.860.382 dan tahun 2020, upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp3.103.800.

Tingkat upah minimum ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan pengurangan pemerintah pusat untuk memastikan kehidupan yang layak dengan imbangkan kondisi tenaga kerja, produktivitas dan pertumbuhan. Dalam hal ini, variabel yang dijadikan pedoman adalah paritas daya beli,



tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah dengan bersumber pada data yang berasal dari lembaga yang berwenang di bidang statistik. Tingkat upah yang tinggi dapat mempengaruhi keputusan individu untuk berpartisipasi atau tidak ke pasar tenaga kerja sehingga upah yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Salah satu upaya dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan adalah dengan memperbaiki sistem upah melalui kebijakan upah minimum. Kenaikan upah memang dapat meningkatkan kesempatan kerja melalui peningkatan konsumsi, namun dalam beberapa kasus justru kenaikan upah berdampak negatif terhadap permintaan tenaga kerja itu sendiri. Rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja cenderung dipengaruhi oleh upah minimum, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistiawati, R (2012) bahwa kenaikan upah minimum akan mengakibatkan berkurangnya lapangan kerja yang juga akan berimbas pada berkurangnya jumlah penyerapan tenaga kerja.

Dengan kondisi yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk berfokus pada Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan yang lebih rendah jika dibandingkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan yang rendah diduga dipengaruhi oleh Indeks Pembangunan Manusia Perempuan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum Provinsi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji **Analisis Partisipasi Perempuan dalam Kegiatan Ekonomi di Sulawesi Selatan (2010-2024)**. Penelitian ini bertujuan

mengetahui gambaran umum partisipasi angkatan kerja perempuan di Sulawesi Selatan.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Sulawesi Selatan tahun 2010-2024.
2. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan di Sulawesi Selatan tahun 2010-2024.
3. Apakah Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan di Sulawesi Selatan tahun 2010-2024.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan permasalahan maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis besaran pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan di Sulawesi Selatan tahun 2010-2024.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis besaran pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan di Sulawesi Selatan tahun 2010-2024.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis besaran pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan di Sulawesi Selatan tahun 2010-2024.



Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Untuk penulis yaitu sebagai sarana pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan penerapan ilmu pengetahuan yang telah ditempuh selama masa perkuliahan.
2. Untuk akademisi sebagai sarana pembelajaran dan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.
3. Untuk pemerintahan yaitu sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang lebih baik agar tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Sulawesi Selatan dapat meningkat



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Angkatan kerja dapat dikatakan sebagai bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif, yaitu memproduksi barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu (Kusumowidho, 2010). Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15-64 tahun) yang aktif secara ekonomi, meliputi penduduk yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran (BPS, 2024). Angkatan kerja perempuan adalah bagian dari angkatan kerja secara keseluruhan yang terdiri dari perempuan yang berusia 15-64 tahun yang aktif di pasar kerja, baik yang bekerja, sedang mencari pekerjaan, atau yang punya pekerjaan namun tidak sedang bekerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (BPS, 2024). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator untuk menghitung besarnya tingkat partisipasi tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dapat digunakan untuk mengetahui penduduk yang aktif bekerja ataupun mencari pekerjaan (menganggur) (Mantra, 2003). Semakin besar Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja



semakin besar jumlah angkatan kerja dalam kelompok yang sama, besar jumlah penduduk yang masih bersekolah dan mengurus rumah semakin besar jumlah yang tergolong bukan angkatan kerja, sehingga

semakin kecil jumlah angkatan kerja dan semakin kecil Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (Payaman, 1998).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja atau dapat dinyatakan sebagai jumlah penduduk yang tergolong angkatan kerja per 100 penduduk usia kerja. Jika penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk 15-64 tahun, Adapun rumus untuk menghitung besarnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebagai berikut (Simanjuntak, 1985):

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Penduduk 15 - 64 tahun}} \times 100$$

Menurut (Sumarsono, 2003) ada beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yaitu, jumlah penduduk yang masih bersekolah, semakin besar jumlah penduduk yang bersekolah maka semakin kecil jumlah angkatan kerja dan semakin kecil Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Selanjutnya, jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga, semakin banyak anggota dalam tiap-tiap keluarga yang mengurus rumah tangga maka semakin kecil Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Kemudian, tingkat pendapatan dan jumlah tanggungan keluarga. Jika suatu keluarga memiliki pendapatan yang relatif besar terhadap biaya hidup maka mereka cenderung memperkecil jumlah anggota keluarga untuk bekerja sehingga tingkat partisipasi kerja relatif rendah. Sebaliknya jika biaya hidup suatu keluarga lebih besar dibandingkan pendapatan keluarga tersebut maka mereka cenderung untuk



semakin banyak jumlah anggota keluarga yang bekerja sehingga tingkat partisipasi kerja relatif tinggi.

Faktor selanjutnya yaitu umur, penduduk dalam kelompok umur 22-55 tahun, terutama laki-laki, umumnya dituntut untuk ikut mencari nafkah sehingga tingkat partisipasi kerja relatif besar. Sedangkan untuk penduduk di atas usia 55 tahun yang kemampuan bekerjanya sudah menurun membuat tingkat partisipasi kerja umumnya rendah. Selanjutnya tingkat upah, jika semakin tinggi tingkat upah yang ditawarkan dalam masyarakat maka akan semakin banyak anggota keluarga yang tertarik masuk pasar kerja atau dengan kata lain semakin tinggi tingkat partisipasi kerja. Kemudian tingkat pendidikan, jika semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin banyak waktu yang disediakan untuk bekerja. Khususnya bagi para wanita, dengan semakin tinggi pendidikan maka kecenderungan untuk bekerja semakin besar sehingga tingkat partisipasi kerja semakin besar. Faktor terakhir adalah kegiatan ekonomi, program pembangunan di satu pihak menuntut keterlibatan lebih banyak orang. Di lain pihak program pembangunan menumbuhkan harapan-harapan baru. Harapan untuk dapat ikut menikmati hasil pembangunan tersebut dinyatakan dalam peningkatan partisipasi kerja sehingga semakin bertambah kegiatan ekonomi maka semakin besar tingkat partisipasi kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan menggambarkan besarnya pasokan tenaga kerja perempuan yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Semakin tinggi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan maka semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja perempuan. Pasokan tenaga kerja perempuan dalam pasar kerja menentukan peran dan keaktifan perempuan dalam kegiatan perekonomian. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan antara lain tingkat pendidikan perempuan, upah tenaga kerja



perempuan, penduduk yang mengurus rumah tangga, tenaga kerja sektor industri pengolahan, tenaga kerja sektor pertanian, dan kondisi ekonomi. Secara matematis Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan dihitung dengan membagi jumlah angkatan kerja perempuan dengan jumlah penduduk perempuan usia kerja dikali dengan 100 (Septiawan & Wijaya, 2020).

Partisipasi tenaga kerja perempuan di Indonesia dipengaruhi oleh faktor sosio-demografi, ekonomi dan budaya (Widarti, 1998). Terdapat tiga kondisi perempuan memasuki pasar tenaga kerja, yaitu kondisi yang memungkinkan (*enabling condition*), seperti jumlah dan usia anak, kondisi yang memfasilitasi (*facilitating condition*), seperti pendidikan atau pelatihan, pengalaman kerja, dan kondisi pasar tenaga kerja lokal, serta kondisi yang mencetuskan (*precipitating condition*), seperti ketidakpuasan terhadap penghasilan keluarga dan ketidakpuasan personal (Audrey et al., 2019).

2.1.2 Teori Pembangunan Manusia

Human Development atau pembangunan manusia adalah suatu proses di dalam menentukan dan memperbanyak pilihan yang dimiliki oleh manusia (UNDP, 1990). Teori ini dicetuskan oleh UNDP guna membangun dan memperbaiki konsep sebelumnya di dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sebelumnya berdasarkan ukuran *Product Domestic Bruto* atau pendapatan per kapita. Menurut *United National Development Programme* (1990), pendapatan per kapita belum mampu memberikan ukuran secara nyata tentang kondisi riil sumber daya manusia di suatu daerah atau negara, hal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan atau kesenjangan antara penduduk yang kaya dengan penduduk yang

ehingga kesejahteraan akan lebih tinggi dialami oleh penduduk yang pendapatan tinggi. Pembangunan manusia muncul pada tahun 1990



guna memperbaiki ukuran tersebut, beberapa premis dasar mengenai konsep pembangunan manusia diantaranya yaitu: 1.) Sebuah pembangunan harus menjadikan manusia sebagai titik utama dari sebuah pembangunan. 2.) Sebuah pembangunan memiliki tujuan untuk memperbanyak pilihan manusia dimana tidak hanya dalam peningkatan pendapatan, namun secara keseluruhan aspek tidak hanya dalam aspek perekonomian. 3.) Pembangunan manusia memfokuskan tidak hanya dalam bagaimana upaya meningkatkan kapabilitas manusia namun juga mengoptimalkan dan memanfaatkan kemampuan yang dimiliki manusia. 4.) Dalam pembangunan manusia didukung oleh empat poin penting diantaranya produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan. 5.) Pembangunan Manusia dijadikan dasar dalam menentukan tujuan dari adanya sebuah pembangunan serta dalam menganalisis pilihan guna tercapainya sebuah pembangunan.

Dalam mencapai tujuan dari pembangunan manusia, terdapat poin penting yang harus diperhatikan. Point-point tersebut harus memuat dasar-dasar yang secara singkat dijelaskan oleh *United National Development Programme* (1995) yaitu sebagai berikut: 1.) Produktivitas. Sebuah usaha dalam meningkatkan kemampuan manusia guna meningkatkan produktivitas didalam meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan manusia, sehingga pembangunan ekonomi termasuk dalam bagian pembangunan manusia. 2.) Pemerataan. Penduduk memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses terhadap sumber daya sosial dan ekonomi, sehingga seluruh kegiatan yang dapat meningkatkan maupun menghalangi kesempatan yang dimiliki harus diperhatikan

peroleh manfaat secara optimal agar kualitas hidup manusia semakin baik. 3.) Kesinambungan. Keseluruhan akses terhadap beberapa sumber



daya termasuk sosial dan ekonomi harus diperhatikan tidak hanya untuk generasi sekarang namun juga untuk generasi yang akan datang, sehingga perlu untuk di persiapkan mulai saat ini. Keseluruhan bentuk sumber daya baik yang berupa sumber daya fisik, sumber daya manusia, maupun sumber daya lingkungan harus terus diperhatikan dan diperbaharui. 4.) Pemberdayaan. Dalam sebuah proses pembangunan, penduduk harus senantiasa terlibat dan berpartisipasi dalam usaha peningkatan pembangunan sehingga dapat memperoleh manfaat dari adanya sebuah pembangunan.

2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia

Pertama kali Indeks Pembangunan Manusia dikembangkan pada tahun 1990 oleh Amartya Sen yaitu seorang pemenang nobel dari India dan Mahbub Ul Hag seorang ekonom yang berasal dari Pakistan dan dibantu oleh Gustav Ranis dari Universitas Yale serta Lord Meghnad yang berasal dari *London School of Economic*. Mulai pada saat itu Indeks Pembangunan Manusia dipergunakan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk melihat seberapa besar peningkatan pembangunan manusia di suatu negara dalam laporan tahunan Indeks Pembangunan Manusia setiap tahun. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga dipergunakan untuk melihat kondisi peningkatan pembangunan manusia di sub-wilayah atau daerah dalam sebuah negara. Indikator kesejahteraan masyarakat yang disusun oleh *United Nations Development Programme (UNDP)* dikenal dengan *Human Development Index (HDI)* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Secara konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. UNDP menyatakan pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta



dipahami dari sudut manusianya, tidak hanya dari pertumbuhan ekonominya (UNDP, 1995).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu sebuah indikator yang menunjukkan bagaimana masyarakat dalam suatu daerah mempunyai kesempatan dalam memperoleh hasil dari adanya pembangunan yang merupakan hak dari bagian masyarakat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan (pendidikan), kesehatan, pendapatan (ekonomi), dan lain sebagainya. Secara universal menurut Todaro dan Stephen (2015), terdapat komponen-komponen utama dalam pembangunan manusia diantaranya yaitu: 1.) Kecukupan. Kecukupan yaitu pemenuhan kebutuhan dasar manusia secara fisik, dimana apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi akan menghambat dan menghentikan kehidupan manusia serta menyebabkan keterbelakangan absolut. Kebutuhan dasar tersebut seperti konsumsi makanan, tempat tinggal, kesehatan, serta keamanan. 2.) Jati diri. Jati diri adalah sebuah dorongan dari dalam diri sendiri untuk memberikan motivasi maupun dorongan untuk maju guna meningkatkan kehidupannya agar lebih baik. 3.) Kebebasan. Kebebasan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk berdiri sendiri dan tidak diperbudak oleh aspek material dalam kehidupan. Dengan adanya kebebasan setiap manusia berhak memilih pilihan-pilihan yang dimilikinya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran dalam mengetahui pencapaian pembangunan manusia yang mempergunakan beberapa komponen dasar kualitas hidup. Sebagai tolok ukur kualitas hidup manusia,



dasar dalam perhitungan IPM yaitu pertama, kesehatan yang terdiri dari harapan umur panjang dan sehat, kedua yaitu pendidikan yang terdiri dari rata-rata lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, ketiga yaitu standar hidup layak

yang mengindikasikan kemampuan daya beli masyarakat.

Tahun 1990 *United National Development Programme* memperkenalkan sebuah indikator yang dapat memberikan gambaran terhadap perkembangan kualitas manusia secara terukur dan representatif dimana indikator tersebut dikenal dengan *Human Development Indeks* atau Indeks Pembangunan Manusia. Ukuran indeks pembangunan manusia berkisar antara 0 hingga 100, yang artinya semakin mendekati angka 100 kualitas pembangunan manusia semakin baik. Menurut UNDP, golongan status indeks pembangunan manusia dalam suatu wilayah/negara terbagi atas empat golongan diantaranya sebagai berikut:

IPM < 50	= <i>Low Human Development</i> (IPM Rendah)
IPM 55 - 69,9	= <i>Medium Human Development</i> (IPM Sedang)
IPM 70 - 79,9	= <i>High Human Development</i> (IPM Tinggi)
IPM ≥ 80	= <i>Very High Human Development</i> (IPM Sangat Tinggi)

IPM yaitu sebuah indeks gabungan atas tiga dimensi penyusun IPM yang dapat memberikan gambaran kualitas manusia. Menurut *United National Development Programme* (2004), rumus perhitungan yang digunakan yaitu:

$$IPM = \frac{1}{3} (Y1 + Y2 + Y3) \dots \dots \dots (2.1)$$

Dengan penjelasan:

IPM	= Indeks Pembangunan Manusia
Y1	= Indeks Harapan Hidup
Y2	= Indeks Pendidikan
Y3	= Indeks Standar Hidup Layak

Selain cara menghitung Indeks Pembangunan Manusia, adapun cara ng komponen dari indeks pembangunan manusia yang meliputi indeks n, indeks pendidikan, dan indeks kehidupan yang layak. Rumus yang n adalah sebagai berikut (BPS, 2021):



1. Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan dapat diukur menggunakan indikator Angka Harapan Hidup (AHH) yang dapat diartikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat. Angka Harapan Hidup (AHH) dihitung berdasarkan sensus dan survei kependudukan serta dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan derajat kesehatan. Dalam menghitung Angka Harapan Hidup, digunakan data angka Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Rumus yang digunakan dalam perhitungan indeks kesehatan yaitu:

$$\text{Indeks Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}}$$

Keterangan:

AHH = Angka Harapan Hidup
 $AHH_{\min}$ = Nilai minimum dari angka harapan hidup
 $AHH_{\max}$ = Nilai maksimum dari angka harapan hidup

2. Indeks Pendidikan

Pengukuran indeks pendidikan menggunakan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Dalam pengukuran indeks pendidikan, angka melek huruf sudah tidak dianggap relevan lagi dikarenakan tidak menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf sudah tinggi di beberapa daerah sehingga tidak dapat membedakan pendidikan antar daerah dengan baik.



Rata-rata Lama Sekolah (RLS) diartikan sebagai jumlah tahun yang dapat dicapai penduduk dalam menempuh pendidikan formal. Cakupan penduduk

yang dihitung dalam perhitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk yang berusia 25 tahun ke atas. Sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) diartikan sebagai harapan lama sekolah yang akan dirasakan oleh anak umur tertentu di masa yang akan datang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada usia-usia berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk usia yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk usia 7 tahun keatas dan digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat tercapai oleh setiap anak. Perhitungan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan indeks pendidikan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$RLS = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$HLS = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$Indeks Pendidikan = \frac{HLS + RLS}{2}$$

Keterangan:

RLS	= Rata-rata Lama Sekolah
RLS_{min}	= Nilai minimum dari rata-rata lama sekolah
RLS_{maks}	= Nilai maksimum dari rata-rata lama sekolah
HLS	= Harapan Lama Sekolah
HLS_{min}	= Nilai minimum dari angka harapan lama sekolah
HLS_{maks}	= Nilai maksimum dari angka harapan lama sekolah



deks Kehidupan Layak

alam pengukuran indeks kehidupan layak indikator yang digunakan yaitu

pengeluaran perkapita disesuaikan, yang sebelumnya diukur menggunakan pendapatan perkapita. Pendapatan per kapita atau PDB perkapita dinilai tidak lagi dapat menggambarkan pendapatan masyarakat dalam suatu daerah sehingga diganti menggunakan pengeluaran perkapita disesuaikan. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan berdasarkan nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun dihitung dari level provinsi maupun kabupaten/kota yang dibuat konstan atau riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada periode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan. Perhitungan indeks pengeluaran atau indeks kehidupan layak menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Indeks Pengeluaran} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

Keterangan:

$\ln(\text{pengeluaran})$ = Pengeluaran per kapita disesuaikan
 $\ln(\text{pengeluaran}_{\min})$ = Nilai minimum pengeluaran per kapita disesuaikan
 $\ln(\text{pengeluaran}_{\max})$ = Nilai maksimum pengeluaran per kapita disesuaikan

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2005).

Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi



angka panjang yang dapat diukur berdasarkan kemampuan suatu negara menghasilkan barang dan jasa dari satu periode ke periode lainnya. Faktor-faktor tersebut disebabkan adanya faktor-faktor produksi yang akan selalu

bertambah jumlah dan kualitasnya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari tujuan ekonomi makro. Hal ini didasari oleh tiga alasan. Pertama, penduduk selalu bertambah. Bertambahnya jumlah penduduk ini berarti angkatan kerja juga akan bertambah. Pertumbuhan ekonomi akan mampu menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja. Jika pertumbuhan ekonomi yang mampu diciptakan oleh suatu negara lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja hal ini akan mendorong terjadinya pengangguran. Kedua, selama keinginan dan kebutuhan tidak terbatas maka perekonomian harus mampu memproduksi lebih banyak barang dan jasa untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan tersebut. Ketiga, usaha menciptakan pemerataan ekonomi melalui retribusi pendapatan akan lebih mudah dicapai dalam periode pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Dalam pengertian ini teori tersebut harus mencakup teori mengenai pertumbuhan output perkapita dan teori mengenai pertumbuhan penduduk. Sebab hanya apabila kedua aspek tersebut dijelaskan, maka perkembangan output perkapita bisa dijelaskan. Kemudian aspek yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang, yaitu apabila selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut output perkapita menunjukkan kecenderungan yang meningkat (Boediono, 1999).

Pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan 1 teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang



diperlukannya. Definisi ini mempunyai 3 (tiga) komponen: pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang; kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat (Jhingan, 2000).

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan dan keluaran total suatu perekonomian (Case, 2004). Yang dimaksud dengan Gross National Product adalah total nilai pasar dari barang-barang akhir dan jasa-jasa yang dihasilkan di dalam suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu biasanya satu tahun. Dalam menghitung produk nasional masih sering menghadapi hambatan. Karena adanya perubahan harga yang berlaku dari tahun ke tahun. Untuk mengatasi hal ini, dalam membandingkan nilai pendapatan nasional yang dihitung menurut harga tetap (konstan). Sedangkan pendapatan nasional yang dinilai menurut harga berlaku pada tahun di mana produksi yang sedang dinilai dinamakan pendapatan nasional menurut harga berlaku.

Adapun teori pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Tokoh Mazhab Klasik yaitu Adam Smith (1723-1790), David Ricardo (1722-1823), Thomas Robert Malthus dan Jhon Stuart Mill. Teori mazhab klasik mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di suatu negara dipengaruhi oleh faktor yaitu banyaknya jumlah penduduk di suatu negara, persediaan



barang-barang, modal, luas tanah, sumber daya alam (SDA) yang dimiliki suatu negara, dan teknologi yang digunakan dalam kegiatan ekonomi disuatu negara. Dalam teori pertumbuhan ekonomi klasik dikemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi tidak selalu mengalami peningkatan, namun akan mengalami fluktuasi sesuai tahapannya. Kemajuan dan pertumbuhan ekonomi di suatu negara tidak hanya dipicu oleh akumulasi modal dan kekayaan alam yang dimiliki oleh negara tersebut melainkan juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusianya. Dengan adanya kualitas sumber daya manusia di suatu negara akan menumbuhkan inovasi-inovasi untuk mengelolah sumber daya alam yang ada.

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik

Tokoh dari ekonomi Neo Klasik yaitu Robert Solow, Harrod Domar, dan J. Scumpeter. Robert Solow berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern dan hasil atau output. Adapun pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif dan dapat negatif. Oleh karenanya, menurut Robert Solow pertambahan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif. Menurut Harrod Domar modal harus dipakai secara efektif, karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peranan pembentukan modal tersebut. Teori ini juga membahas tentang pendapatan nasional dan kesempatan kerja. J. Scumpeter berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh adanya proses inovasi-inovasi (penemuan-penemuan baru teknologi



yang dilakukan oleh para pengusaha. Tanpa adanya inovasi tidak ada
tumbuhan ekonomi.

engan menggunakan teori Harrod-Domar, menekankan bahwa

pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya dengan lebih mengutamakan perkembangan sektor-sektor ekonomi yang padat karya seperti sektor pertanian dan industri-industri berskala kecil (Todaro, 2000).

Apabila pertumbuhan ekonomi dilihat dari pertambahan output dalam bentuk GDP konstan, maka akan menghilangkan unsur inflasi didalamnya. Sementara itu di sisi lain inflasi ini sebenarnya dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan dapat menciptakan kesempatan kerja. Pertumbuhan ekonomi daerah diartikan sebagai kenaikan produk domestik regional bruto (PDRB) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi daerah secara langsung ataupun tidak langsung akan menciptakan lapangan kerja. (Arsyad, 1999).

Dari definisi diatas dapat kita simpulkan bahwa tolak ukur dari keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah tingkat PDRB daerah tersebut. PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan faktor-faktor produksi. PDRB juga merupakan jumlah dari nilai tambah yang diciptakan dari seluruh aktivitas ekonomi suatu daerah atau sebagai nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah (Mankiw, 2000).

Secara umum PDRB dapat dihitung berdasarkan harga konstan atau berdasarkan harga berlaku (Pantjar, 2003). Berdasarkan harga berlaku maka PDRB dihitung atas harga berlaku pada tahun bersangkutan, sedangkan harga konstan PDRB dihitung atas dasar harga tetap, atau ditentukan tahun dasarnya. Harga konstan adalah merupakan ukuran kemakmuran yang lebih baik, sebab perhitungan output barang dan jasa perekonomian



yang dihasilkan tidak dipengaruhi oleh perubahan harga atau dihitung atas harga tetap.

2.1.5 Upah Minimum Provinsi (UMP)

Teori penawaran tenaga kerja wanita (*labor supply of women*) menerangkan bahwa perubahan tingkat upah menjadi kunci yang menentukan apakah individu (termasuk perempuan) memilih masuk atau keluar dari pasar tenaga kerja (Borjas, 2013). Hal ini karena upah berkaitan dengan kesejahteraan para tenaga kerja, misalnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Oleh karena itu, ketika upah yang berlaku tinggi tenaga kerja lebih banyak yang ingin menawarkan tenaganya untuk suatu pekerjaan, sedangkan ketika upah rendah lebih sedikit tenaga kerja yang menawarkan tenaganya untuk suatu pekerjaan (Septiawan & Wijaya, 2020).

Pasar tenaga kerja diatur oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja akan menentukan tingkat upah (Mankiw, 2003). Jumlah permintaan dan penawaran tenaga kerja merupakan fungsi dari tingkat upah berlaku. Keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja menentukan besarnya penempatan atau jumlah orang yang bekerja dan tingkat upah berlaku yang kemudian dipakai sebagai acuan atau pertimbangan baik oleh individu maupun perusahaan di daerah yang bersangkutan (Simanjuntak, 1998).

Pembayaran terhadap tenaga kerja dalam kehidupan sehari-hari dibedakan menjadi dua istilah, yaitu upah dan gaji. Gaji diartikan sebagai imbalan terhadap pekerja-pekerja tetap atau pekerja profesional di suatu perusahaan, sedangkan upah lebih ditekankan kepada pekerja



pekerja kasar yang pekerjaannya cenderung berpindah-pindah. Upah merupakan hak yang sangat mendasar bagi pekerja, sehingga upah harus mendapatkan perlindungan secara memadai dari pemerintah (Sukirno, 2005).

Secara teoritis, upah yang diberikan oleh pengusaha merupakan harga dari tenaga yang dikorbankan pekerja yang terbagi menjadi dua macam yaitu (Sukirno, 2008): (1) Upah Nominal merupakan sejumlah upah dalam bentuk uang yang diterima secara rutin para pekerja; (2) Upah Riil merupakan upah nominal yang diperoleh serta dapat ditukarkan dengan barang dan jasa yang diukur berdasarkan banyaknya barang dan jasa yang didapatkan dari penukaran tersebut (Sukirno, 2005).

Secara hukum pengaturan mengenai upah minimum tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum. Pengertian Upah Minimum menurut pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman (Ahmaddien & Sa'dia, 2020).

Dalam teori neo-klasik, upah yang diterima oleh pekerja akan senilai dengan pertambahan hasil marginalnya. Upah dalam hal ini berfungsi sebagai imbalan atas usaha kerja yang diberikan seseorang terhadap pengusaha. Upah dibayarkan oleh pengusaha sesuai dengan usaha kerja atau produktivitas yang diberikan oleh tenaga kerja. Artinya, pada teori ini dapat diketahui bahwa upah didasarkan pada asas pertambahan hasil faktor produksi, dimana upah

an imbalan atas pertambahan nilai produksi yang diterima pengusaha dari Teori neo-klasik menganggap bahwa upah cukup fleksibel di pasar tenaga



kerja sehingga permintaan tenaga kerja selalu seimbang dengan penawaran tenaga kerja dan tidak ada kemungkinan timbulnya pengangguran. Artinya pada tingkat upah riil semua orang yang bersedia untuk bekerja pada tingkat upah tersebut akan memperoleh pekerjaan karena pada dasarnya mereka yang menganggur adalah mereka yang tidak bersedia bekerja pada tingkat upah yang berlaku.

Menurut Simanjuntak (1998) kenaikan upah mempengaruhi penyediaan tenaga kerja melalui dua daya saing berlawanan. Kenaikan upah di satu pihak meningkatkan pendapatan (*income effect*) yang cenderung untuk mengurangi TPAK. Dipihak lain, peningkatan upah membuat harga waktu menjadi relatif lebih mahal. Pekerjaan menjadi lebih menarik dan menggantikan waktu senggang (*substitution effect*). Berbeda halnya dengan teori standar upah Mankiw (2012) yang menjelaskan bahwa peningkatan upah minimum ternyata akan meningkatkan jumlah pekerja (Wahyuningtyas, 2019).

Borjas (2016) menjelaskan bahwa faktor utama memasuki pasar kerja adalah antara *reservation wage* dengan upah pasar. Dalam hal ini, perempuan yang telah menikah akan mempertimbangkan upah pasar dan jam kerja sebagai bagian dari keputusannya untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja. Tingkat upah akan mempengaruhi jumlah penawaran tenaga kerja karena jika tingkat upah naik maka jumlah tenaga kerja yang ditawarkan akan meningkat dan sebaliknya. Tingkat upah memiliki peranan langsung terhadap waktu kerja yang ditawarkan. Umumnya, upah yang tinggi akan menjadi motivasi untuk bekerja sehingga upah mempunyai korelasi positif dengan waktu yang ditawarkan.



Hubungan Antar Variabel

Bagian ini akan menjelaskan tentang teori dan hubungan antara variabel

independen (Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum Provinsi) terhadap variabel dependen (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan) di Sulawesi Selatan.

2.2.1 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran yang dikembangkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) untuk menilai capaian pembangunan manusia berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu kesehatan (harapan hidup saat lahir), pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta standar hidup layak (pengeluaran per kapita yang disesuaikan). Dalam konteks gender, IPM perempuan mengukur kualitas hidup perempuan dalam dimensi-dimensi tersebut dan mencerminkan kapasitas perempuan dalam mengakses sumber daya pembangunan secara setara.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan adalah persentase perempuan usia kerja (15-64 tahun) yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja. Tingginya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja merupakan indikator penting bagi pencapaian kesetaraan gender dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

Menurut Todaro dan Smith (2012), pembangunan manusia yang berkualitas, khususnya dalam pendidikan dan kesehatan, merupakan faktor utama yang mempengaruhi kemampuan individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Sejalan dengan itu, Becker (1964) dalam *Human Capital Theory*

kan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan meningkatkan produktivitas kerja dan partisipasi dalam



pasar tenaga kerja. Teori ini menekankan bahwa investasi dalam modal manusia akan menghasilkan pengembalian dalam bentuk pendapatan, peluang kerja, dan mobilitas ekonomi. Dengan demikian, perempuan yang memiliki pendidikan dan kesehatan yang baik lebih berpeluang untuk bekerja, mendapatkan pekerjaan yang layak, dan mempertahankan posisinya dalam dunia kerja.

Kabeer (2005) dalam teorinya mengenai pemberdayaan perempuan menyatakan bahwa akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan sumber daya ekonomi merupakan kunci utama untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan produktif. Ketika perempuan memperoleh peningkatan dalam dimensi-dimensi tersebut, mereka memiliki otonomi lebih besar dalam mengambil keputusan, termasuk keputusan untuk bekerja.

2.2.2 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan

Pembangunan ekonomi merupakan kemampuan usaha yang dimiliki dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonomi demi terwujudnya infrastruktur, dan tingkat pendidikan yang semakin tinggi dengan adanya kemajuan teknologi yang ada. Dengan harapan adanya kesempatan kerja semakin bertambah, maka pendapatan masyarakat pun akan lebih baik seiring dengan tercapainya kemakmuran masyarakat (Sukirno, 2006).

Menurut Prof Simon Kuznets dalam Jhingan (2004), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses naiknya kemampuan dalam menghasilkan barang-barang ekonomi kepada penduduk dalam waktu yang lama. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi adalah perubahan yang terjadi terhadap kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa lebih banyak atau meningkat seiring



dengan tercapainya kemakmuran masyarakat.

Menurut Nindya E. (2008) dengan demikian dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mengakibatkan tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja. Hal ini dimaksudkan bahwa jumlah mereka yang terlibat dalam pasar tenaga kerja akan bertambah besar pada saat pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan yang signifikan. Jadi semakin bertambah kegiatan ekonomi semakin besar tingkat partisipasi angkatan kerja.

Teori yang dikemukakan oleh (Simanjuntak, 2000) yang menyatakan bahwa kegiatan ekonomi sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi angkatan kerja. Dimana dengan adanya suatu kegiatan ekonomi maka akan menuntut keterlibatan lebih banyak orang di pasar tenaga kerja, sehingga akan memberikan keuntungan atau hasil untuk dinikmati pula. Jadi semakin bertambahnya kegiatan ekonomi maka semakin besar pula tingkat partisipasi angkatan kerja. Sehingga dapat disimpulkan dengan tingginya pertumbuhan ekonomi maka akan mengakibatkan tingginya tingkat partisipasi angkatan kerjanya juga, begitu juga sebaliknya semakin berkurangnya kegiatan ekonomi maka penurunan terhadap pertumbuhan ekonomi pun akan terjadi. Dengan demikian apabila pertumbuhan ekonominya menurun maka tingkat partisipasi angkatan kerjanya juga akan berkurang.

2.2.3 Hubungan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan

Salah satu elemen yang mempengaruhi tingkat partisipasi tenaga kerja besarnya upah yang ditawarkan. Ketika tingkat upah di pasar kerja tinggi, minat orang untuk bergabung dalam pasar tenaga kerja juga akan tinggi. Sebaliknya, jika tingkat upah rendah, individu yang berada dalam



kelompok usia angkatan kerja mungkin tidak tertarik untuk terlibat dalam pasar tenaga kerja. Mereka cenderung memilih untuk tidak bekerja atau memilih alternatif di luar angkatan kerja (Simanjuntak, 2001).

Tingkat upah yang terlalu tinggi dalam suatu masyarakat dapat mengakibatkan peningkatan jumlah angkatan kerja, tanpa adanya peningkatan yang sebanding dalam lapangan pekerjaan. Situasi ini dapat mengakibatkan peningkatan tingkat pengangguran terbuka (Mankiw, 2000). Peran upah tenaga kerja sangat signifikan dalam dunia ketenagakerjaan. Upah merupakan faktor kunci yang, bila dipertimbangkan dari perspektif penawaran tenaga kerja, berdampak pada tingkat penyerapan tenaga kerja. Menurut Todaro (2006), semakin tinggi tingkat upah yang ditawarkan kepada tenaga kerja hal ini akan menurunkan tingkat penyerapan tenaga kerja (Ilham, 2016). Ketika tingkat upah tinggi, dapat menyebabkan peningkatan dalam kualitas tenaga kerja, sementara sebaliknya, bila tingkat upah yang ditawarkan rendah, dapat menyebabkan keberadaan tenaga kerja yang kurang terlatih (Michael, 2004). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hardiani et al., (2020) menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Wanita.

Dalam paradigma ekonomi neoklasik, penawaran tenaga kerja akan meningkat seiring dengan peningkatan tingkat upah, sementara permintaan terhadap tenaga kerja akan menurun ketika tingkat upah naik. Tingkat upah memiliki dampak signifikan pada tingkat partisipasi angkatan kerja, dimana peningkatan tingkat upah di pasar tenaga kerja akan mendorong lebih banyak usia kerja untuk memilih terlibat dalam pasar tenaga kerja. Hal ini secara signifikan akan mengakibatkan peningkatan jumlah angkatan kerja dan penurunan



jumlah mereka yang bukan angkatan kerja, sehingga meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja. Dengan meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja yang disebabkan oleh kenaikan upah yang ditawarkan, kemungkinan terjadi peningkatan pengangguran terbuka. Fenomena ini terjadi ketika tingkat upah naik, menyebabkan lebih banyak penduduk usia kerja memasuki pasar tenaga kerja. Namun, peningkatan ini tidak diimbangi dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan, sehingga jumlah angkatan kerja melebihi permintaan tenaga kerja yang ada, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat pengangguran. Tingkat partisipasi angkatan kerja dipengaruhi oleh tingkat upah, di mana peningkatan tingkat upah dalam masyarakat akan mendorong lebih banyak anggota keluarga untuk terlibat dalam pasar tenaga kerja (Gianie, 2009).

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasarkan atas penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Dalam beberapa kasus terdapat beberapa hal yang memiliki karakteristik yang sama dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah untuk melihat pengaruh indeks pembangunan manusia perempuan, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum provinsi terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Sulawesi Selatan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang di anggap relevan dengan penelitian ini:

Risjiati, A. P (2025) dengan judul "Analisis Determinan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Upah Minimum di Indonesia Tahun 2015-2023" yang berlokasi di Indonesia. Analisis digunakan adalah regresi data panel. Dengan Hasil analisis menunjukkan IPM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi angkatan perempuan, yang berarti peningkatan IPM di daerah-daerah tertentu



mendorong lebih banyak perempuan untuk memasuki pasar kerja.

Novita, R (2024) dengan judul "Determinan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di 6 provinsi di Pulau Jawa Tahun 2018-2022" yang berlokasi di Pulau Jawa. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Dengan hasil bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di 6 provinsi di Pulau Jawa tahun 2018-2022.

Kurniasari, W (2022) dengan judul "Dimensi Pemberdayaan dan Kesehatan Serta Implikasinya Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (Studi Kasus Indonesia Tahun 2017-2021)" yang berlokasi di Indonesia. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi data panel. Dengan hasil bahwa variabel upah perempuan berpengaruh parsial yang signifikan. Variabel upah secara simultan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan.

Asmara, K. et al (2024) dengan judul "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Sampan" yang berlokasi di Kabupaten Sampan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linier berganda. Dengan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja namun secara parsial tidak berpengaruh.

Mumekh, V.G et al (2023) dengan judul "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Minimum Provinsi (UMP) Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Sulawesi Utara" yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Utara. yang digunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian variabel



pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja.

Astina (2021) dengan judul "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Bone" yang berlokasi di Bone. Analisis yang digunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Bone.

Ramadhan, B.A. et al (2023) dengan judul "Analisis Pengaruh Populasi Penduduk, Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Banten Tahun 2017-2021" yang berlokasi di Banten. Analisis yang digunakan regresi data panel. Variabel yang digunakan indeks pembangunan manusia (IPM), populasi penduduk (POP), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan upah minimum regional (UMR). Hasil penelitian menunjukan Indeks pembangunan Manusia (IPM) dan upah minimum regional (UMR) berpengaruh signifikan terhadap Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK).

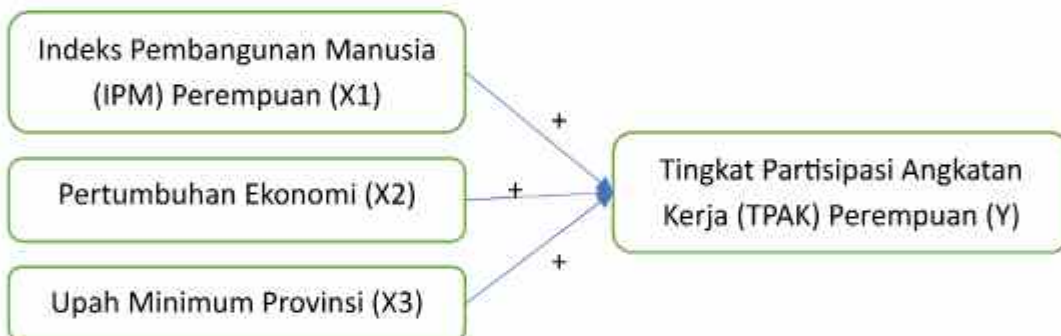
Amriani, N. R. (2023) dengan judul "Determinan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berbasis Gender di Indonesia" yang berlokasi di Indonesia. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Variabel yang digunakan indeks pembangunan gender, indeks pemberdayaan gender, jumlah perempuan mengurus rumah tangga, dan upah minimum. Hasil penelitian variabel upah minimum berpengaruh secara signifikan dan menunjukkan arah yang positif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Indonesia tahun 2017-2021.



2.4 Kerangka Pemikiran

Variabel independen ialah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan (X_1), Pertumbuhan Ekonomi (X_2), dan Upah Minimum Provinsi (X_3), sedangkan variabel dependen Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (Y) di Provinsi Sulawesi Selatan.

Variabel ini merupakan variabel penting yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja, oleh karena itu dengan meneliti ini maka dapat dijadikan referensi serta informasi baru terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Provinsi Sulawesi Selatan. Di bawah ini merupakan kerangka konseptual dari penelitian ini.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian dan perlu diuji kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan (X_1) berpengaruh positif terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan di Sulawesi Selatan tahun 2010-2024.
2. Pertumbuhan Ekonomi (X_2) berpengaruh positif terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan di Sulawesi Selatan tahun 2010-2024.
3. Upah Minimum Provinsi (X_3) berpengaruh positif terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan di Sulawesi Selatan tahun 2010-2024.



2010-2024.

3. Upah Minimum Provinsi (X3) berpengaruh positif terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan di Sulawesi Selatan tahun 2010-2024.

